

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Endorsement Sebagai Penghasilan yang Dapat Dikenakan Pajak**

##### **1. Pengaturan Endorsement Sebagai Penghasilan yang Dapat Dikenakan Pajak**

Kegiatan endorsement yang dilakukan artis serta selebgram pada media sosial dapat dikenakan pajak oleh pemerintah karena merupakan kegiatan ekonomi yang bisa menghasilkan keuntungan besar. Penggunaan media sosial semakin meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini. Berkat media sosial banyak orang yang mendadak terkenal, hal ini menarik minat pemilik usaha maupun perusahaan untuk mempromosikan produknya melalui akun media sosial mereka.

Penulis menganalisa skema yang berlaku terhadap kegiatan yang dilakukan artis maupun selebgram sebenarnya sama dengan *sales promotion girl* (spg), yakni pengenaan pajak penghasilan (Pph) atas penggunaan jasa individu. Artis dan selebgram menawarkan jasa endorsement untuk mempromosikan suatu produk tertentu di akun instagram pribadinya maupun melalui media sosial lainnya. Mereka memamerkan produk tertentu dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan testimoni dan memperlihatkan cara pakai suatu produk tergantung bagaimana kreativitas

para selebgram. Dengan memiliki banyak pengikut, tentu lebih mudah bagi para selebgram mengiklankannya kepada masyarakat. Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan endorsement ini didapat dari pemilik usaha atau perusahaan produk tertentu yang diiklankan produknya. Intinya adalah selebgram menawarkan jasa iklan produk dimana dengan memiliki banyak pengikut instagram maka pengiklan akan mendapat keuntungan berlipat ketika produknya diiklankan dan digunakan oleh selebgram tersebut.

Regulasi mengenai pajak penghasilan terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi:

*“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”*

Pengaturan pada Pasal 4 tersebut menjelaskan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk

apapun. Setiap orang merupakan subjek pajak dan telah wajib dikenai pajak apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, yakni memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan yang diterima diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Utang pajak menurut ajaran formal timbul karena undang-undang pada saat dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak.<sup>44</sup> Sedangkan, menurut ajaran material utang pajak ditentukan oleh undang-undang dan dipenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif. Dengan sendirinya berarti bahwa timbulnya utang pajak diperlukan adanya campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak asal syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi.<sup>45</sup>

Selanjutnya mengenai pajak penghasilan juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

*“(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.”*

---

<sup>44</sup> Sri Pudyatmoko, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, CV Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 66.

<sup>45</sup> Rochmat Soemitro, 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Eresco, Bandung, hlm. 2.

Jelas bahwa penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Dan dalam ayat (2) dijelaskan bahwa:

*“Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :*

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan*
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.”*

Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa:

*“besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)”*

Penulis menganalisa pada dasarnya, penerapan pemungutan pajak adalah untuk mereka yang penghasilannya melebihi PTKP, jadi apabila penghasilan artis maupun selebgram pada kegiatan endorsement melalui media sosial masih dibawah PTKP perbulan tidak perlu dikenakan pajak

penghasilan.<sup>46</sup> Akan tetapi, bila memenuhi syarat maka harus dikenakan pajak penghasilan. Menurut Yustinus Prastowo selaku direktur eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) pemerintah agak kesulitan dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan pada kegiatan endorsement dalam media sosial lantaran sistem pemungutan pajaknya bersifat *self assessment*, sehingga diperlukan inisiatif wajib pajak itu sendiri.<sup>47</sup>

## 2. Kriteria Penetapan Subjek Dan Objek Pajak Endorsement

Pajak penghasilan atau dalam hal ini disebut pajak endorsement mengatur mengenai penghasilan atau laba yang diterima dan diperoleh orang pribadi maupun badan. Didalam pajak penghasilan terdapat subjek dan objek wajib pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Subjek pajak penghasilan yaitu :

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c. Badan

---

<sup>46</sup> Ajeng Widya, 2016, "*tak semua selebgram dikenakan pajak*", URL: [www.klinikpajak.co.id/berita=detail/?id=berita+pajak++tak+semua+selebgram+dikenakan+pajak](http://www.klinikpajak.co.id/berita=detail/?id=berita+pajak++tak+semua+selebgram+dikenakan+pajak) , diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

<sup>47</sup> Dusep Malik dan Chandra G. Asmara, 2016, "*Pengamat: Selebgram, Youtuber Memang Harusnya Kena Pajak*", URL: <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/834113-pengamat-selebgram-youtuber-memang-harusnya-kena-pajak> , diakses pada tanggal 22 Juli 2018.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)<sup>48</sup>

Subjek pajak terbagi menjadi 3, yaitu subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, dan tidak termasuk subjek pajak. Subjek pajak dalam negeri antara lain terdiri dari:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Pengecualiannya adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD.

---

<sup>48</sup> Mardiasmo, 2008, "*Perpajakan Edisi Revisi 2008*", Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 130.

- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.<sup>49</sup>

Subjek pajak luar negeri antara lain terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 30

Subjek pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang telah menerima dan memperoleh penghasilan sedangkan subjek pajak luar negeri yang sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sedangkan, objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan yang diperoleh atas kemampuan ekonomis wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Objek PPh Menurut Undang-Undang Pajak yaitu :

- a) penggantian atau imbalan
- b) hadiah dari undian
- c) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
- d) penerimaan kembali
- e) bunga, dividen, royalti, sewa
- f) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- g) keuntungan karena pembebasan utang
- h) keuntungan selisih kurs mata uang asing
- i) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- j) premi asuransi



- k) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- l) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- m) penghasilan dari usaha berbasis syariah
- n) imbalan bunga; dan
- o) surplus Bank Indonesia.<sup>51</sup>

Bagi wajib pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak adalah setiap penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia sedangkan bagi wajib pajak luar negeri yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. Kriteria dalam penetapan subjek pajak adalah orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan atas suatu karya yang mereka buat dan menghasilkan suatu tambahan ekonomis.

Penulis menganalisa pada umumnya selebgram adalah orang pribadi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan subjek pajak. Selebgram lebih bersifat independen dimana mereka bukan tenaga kerja. Selebgram berdiri sendiri dan tidak ada tanggungjawab terhadap instansi tertentu. Dilihat dari hal tersebut selebgram mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 133.

harus disetorkan kepada Ditjen Pajak. Kriteria dalam penetapan objek pajak endorsement dilihat dari penghasilan setiap orang yang mempunyai tambahan dari kemampuan ekonomis yang berarti wajib membayar pajak di dalam hal tersebut selebgram mempunyai tambahan penghasilan yang diperoleh melalui media sosial, sehingga penghasilan yang diperoleh selebgram harus dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya.<sup>52</sup>

#### **B. Implikasi Hukum Penarikan Pajak Endorsement Sebagai Objek Pajak**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tidak memberikan definisi yang detail mengenai profesi endorse. Apabila pajak endorsement dikategorikan sebagai obyek pajak maka, memiliki implikasi hukum sebagai berikut.

1. Dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh hanya menggunakan artis sebagai salah satu contoh umum penerima penghasilan yang termasuk kategori bukan pegawai dan wajib dipotong pajak penghasilan atas imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja.

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan, atau

---

<sup>52</sup> Inca Nadya Damupoliii, *“Pajak Penghasilan pada Kegiatan Youtuber dan Selebgram dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan”*, Lex Privatum Volume V/ Nomor 3, Mei 2017, Fakultas Hukum Unsrat, hlm. 156.

unit perusahaan yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa pun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dalam pengertian pemberi kerja termasuk juga organisasi internasional yang tidak dikecualikan dari kewajiban memotong pajak. Yang dimaksud dengan "pembayaran lain" adalah pembayaran dengan nama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain, seperti bonus, gratifikasi, dan tantiem. Yang dimaksud dengan "bukan pegawai" adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja sehubungan dengan ikatan kerja tidak tetap, misalnya artis yang menerima atau memperoleh honorarium dari pemberi kerja.<sup>53</sup>

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Pemerintah cenderung membatasi definisi endorser ke dalam kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan meliputi pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama,

---

<sup>53</sup> [www.Ortax.com](http://www.Ortax.com), diakses pada 23 Juli 2019

penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Penulis dapat menyimpulkan bahwa ketentuan yang mengatur aspek perpajakan untuk endorser dalam peraturan perpajakan Indonesia masih minim. Dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan Indonesia tidak memberikan perlakuan secara khusus untuk endorser. Seperti profesi lainnya, penghasilan yang diterima oleh endorser wajib dipotong oleh pemberi kerja apabila pekerjaan dilakukan oleh artis sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan objek PPh Pasal 23 apabila pekerjaan dilakukan melalui Wajib Pajak Badan seperti perusahaan *agency*, *artist management* atau *event organizer* maka, wajib dipotong pajak oleh pemberi kerja.

3. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yang menyebutkan bahwa jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi:
  - a) tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  - b) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
  - c) olahragawan;

- d) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e) pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f) agen iklan;
- g) pengawas atau pengelola proyek;
- h) perantara;
- i) petugas penjaja barang dagangan;
- j) agen asuransi; dan
- k) distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

Penulis menganalisa pada prinsipnya sebenarnya pemungutan pajak penghasilan terhadap endorser kembali kepada pemungutan pajak penghasilan pada umumnya. Tidak dibedakan secara spesifik sebagai suatu pajak atas selebgram. Pemungutan pajak penghasilan terhadap endorser pada prinsipnya sama saja dengan prinsip pajak PPh di PPh Pasal 4 bahwa segala macam penghasilan, penghasilan itu adalah segala macam tambahan kemampuan ekonomis dengan cara dan bentuk apapun, dalam nama dan bentuk apapun.

Hal ini dimaksudkan agar perkembangan teknologi terakhir yang menyebabkan banyaknya perubahan media orang memperoleh penghasilan, tetapi pada prinsipnya tetap penghasilan. Sehingga dengan demikian bukan suatu hal yang baru pemungutan pajak penghasilan terhadap endorser, tetapi ini

hanya sebagai model baru saja dari cara memperoleh penghasilan. Hampir sama sepanjang para endorser tetap memperoleh penghasilan, maka akan tentu berlaku pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa tahun terakhir ini endorser itu menjadi marak. Seperti ada sesuatu yang baru. Sebelumnya kita hanya mengenal transaksi online yang sekarang sudah keliatan menjadi internasional. Seperti online *marketplace*, kemudian *classified ads*, kemudian *daily coupon* dan sebagainya itu malah menjadi biasa sekarang. Lalu beberapa tahun terakhir ini tiba-tiba muncul para endorser.

Penulis menganalisa pada dasarnya hal ini kembali kepada penghasilan setiap orang yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis dapat berarti wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sepanjang yang memperoleh penghasilan sudah memenuhi kriteria ada objeknya dan di atas PTKP tentu dia harus bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu sebenarnya prinsip pajak penghasilan. Karena media orang bertransaksinya sekarang baru sehingga Direktorat Jendral Pajak tentu harus mengikutinnya dengan ide-ide pengawasan yang baru.

Penulis menelaah Direktorat Jendral Pajak tidak bisa mengandalkan strategi yang lama. Karena para endorser memakai metode atau media yang berbeda dan tidak sama dengan online *marketplace*. Kita memahami bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang berdagang di tanah abang, buka toko secara fisik dengan orang yang berdagang di *online marketplace*, buka toko tapi di secara *online*. Bedanya yang satu punya toko, yang satu tidak punya toko.

Tetapi pada prinsipnya perdagangan dilakukan dengan cara yang sama, dia mentransaksikan barang sehingga perlakuan pajaknya sama. Sehingga pada dasarnya sama dengan endorser sebenarnya. Endorser itu sebenarnya memiliki fungsi membantu pemasaran produk, sehingga sebenarnya kalau kita dalam konteks bisnis biasa tenaga marketing sebenarnya. Jadi objek pajak seperti yang didapat oleh endorser sudah dikenal sejak lama, itu dilakukan baik oleh badan, dilakukan baik oleh orang pribadi.

Dalam konteks endorser melibatkan banyak pihak. Yang pertama tentu pihak yang mempunyai produk. Dalam pihak yang mempunyai produk ini bisa menghubungi endorser bisa secara langsung kepada endorser yang bersangkutan, bisa juga melewati agen, agen atau seperti manajemen artis saja seperti biasa. Biasanya bagi *celebrity* endorser dalam manajemen artis nanti manajemen artisnya yang meng-contact selebgram yang bersangkutan. Nah dalam konteks ini tentu perlakuan perpajakan sebenarnya standar saja, kalau misalnya endorser lewat agen yang merupakan corporate pada dasarnya endorser tentu dipotong PPh sesuai pasal 23 UU Pajak Penghasilan. Tapi kalau misalnya endorser lewat artis langsung, ini juga kita petakan ada yang disebut dengan paid endorsement ada yang disebut paid promote.

Dalam praktik endorser terdapat selebriti endorser atau endorser yang bersangkutan memakai produk yang bersangkutan, adapula yang cuma sekedar memberikan promosi karena sepemahaman kita. Sehingga, dengan demikian implikasi hukum penarikan pajak endorsement sebagai objek pajak memiliki

perlakuan perpajakan yang sama, pada akhirnya akan dipotong Pph. Jika pemberi penghasilan dalam hal ini perusahaan itu adalah merupakan berkewajiban memotong PPh Pasal 21 maka harus potong PPh Pasal 21 jika tidak, maka berarti para endorser yang bersangkutan tentu harus melaporkan penghasilan yang diterima di SPT-nya di akhir tahun kepada Direktorat Jendral Pajak.

Penulis menganalisa implikasi hukum penarikan pajak endorsement sebagai objek pajak adalah masih memakai ketentuan yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana pada umumnya selebgram adalah orang pribadi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan subjek pajak. Selebgram lebih bersifat independen dimana mereka bukan tenaga kerja. Selebgram berdiri sendiri dan tidak ada tanggungjawab terhadap instansi tertentu. Dilihat dari hal tersebut selebgram mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus disetorkan kepada Ditjen Pajak. Pada dasarnya, penerapan pemungutan pajak adalah untuk mereka yang penghasilannya melebihi PTKP, jadi apabila penghasilan artis maupun selebgram pada kegiatan endorsement melalui media sosial masih dibawah



PTKP perbulan tidak perlu dikenakan pajak penghasilan.<sup>54</sup> Akan tetapi, bila memenuhi syarat maka harus dikenakan pajak penghasilan.



---

<sup>54</sup> Ajeng Widya, 2016, “*tak semua selebgram dikenakan pajak*”, URL: [www.klinikpajak.co.id/berita=detail/?id=berita+pajak+-+tak+semua+selebgram+dikenakan+pajak](http://www.klinikpajak.co.id/berita=detail/?id=berita+pajak+-+tak+semua+selebgram+dikenakan+pajak) , diakses pada tanggal 23 Juli 2018.